



Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi

PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017



Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi

PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
Tahun 2017

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip *flexible learning* sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Modul 3 Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi	iv
Petunjuk Penggunaan Modul	iv
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul.....	v
Pengantar Modul	vi
Unit 1 Musyawarah Mufakat dalam BPUPKI.....	1
Uraian Materi	1
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1
Perumusan UUD Negara RI Tahun 1945	2
Penugasan 1	5
Latihan Soal.....	6
Unit 2 Menjadi Bangsa yang Berkonstitusi	7
Uraian Materi	7
Sidang PPKI 18 Agustus 1945	7
Perubahan Naskah Piagam Jakarta.....	9
Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945	9
Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945	10
Penugasan 2	11
Latihan Soal	12
Unit 3 Mengingat Kebaikan Tokoh Pendiri Negara.....	15
Uraian Materi	15
Susunan Keanggotaan BPUPKI/PPK.....	16
Tokoh Pendiri Negara	17
Penugasan 3	20
Rangkuman/ “Mari Kita Ingat”	21
Kunci Jawaban	22
Saran Referensi/Daftar Pustaka.....	30

MARI MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul 3 dengan tema “Mari Membangun Kesadaran Berkostitusi” terbagi dalam tigasub tema atau unit sebagai berikut.

Bangga Cinta Pancasila		
UNIT 1 Musyawarah Mufakat dalam BPUPKI	UNIT 2 Menjadi Bangsa yang Berkonstitusi	UNIT 3 Mengingat Keباikan-keباikan Tokoh Pendiri Negara
<p>MATERI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Konstitusi • Pantia Perancang UUD • Proses Perumusan UUD Negara RI Th 1945 <p>PENUGASAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan soal-soal latihan tentang konsep konstitusi 	<p>MATERI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sidang PPKI Tgl 18 Agustus 1945 • Ssitematika UUD Negara RI Th 1945 • Arti Penting UUD Negara RI Th 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia <p>PENUGASAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dengan rumusan dalam Pembukaan UUD Negara RITahun 1945 	<p>MATERI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran Tokoh Perumus UUD Negara RI Tahun 1945 <p>PENUGASAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan gambar Membuat tulisan tentang sikap yang dapat diteladani dari tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945
Mari Berlatih Mengerjakan Soal Latihan		

Unit 3.1.Musyawahar Mufakat dalam BPUPKI, memuat penjelasan mengenai proses perumusan, dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam persidangan BPUPKI. Unit 3.2.Menjadi Bangsa yang Berkonstitusi, memuat uraian tentang arti pentingnya konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia; dan Unit 3.3.Mengingat Keباikan-Keباikan Tokoh Pendiri Negara, menguraikan tentang peran penting para tokoh pendiri negara, keteladanan, serta jasa-jasanya bagi bangsa dan negara Indonesia. Modul ini juga dilengkapi dengan tugas maupun latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman dan penguasaan warga belajar terhadap materi yang telah dipelajari. Modul ini disusun secara runtut berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui gambaran isi modul.
2. Baca tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan dan aktivitas penugasan yang terdapat pada modul.

Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian aktivitas penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

- 1) Patuh menjalankan ajaran agamasebagaimana dicontohkan oleh para tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945.
- 2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab dengan melaksanakan tugas-tugas dalam mempelajari modul ini.
- 3) Menjelaskan pengertian konstitusi
- 4) Menjelaskan proses perumusan UUD Negara RI Tahun 1945.
- 5) Menjelaskan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
- 6) Menjelaskan sistematika UUD Negara RI Tahun 1945.
- 7) Menjelaskan arti penting UUD Negara RI Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia.
- 8) Mendeskripsikan peran tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945
- 9) Merefleksikan sikap, perilaku, dan karakter yang diteladankan oleh tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

Pengantar Modul



Gambar: Aturan main dalam Sepak bola

Dalam dunia olahraga seperti sepak bola, futsal, volley, dan sebagainya kita tahu bahwa ada aturan main yang harus ditaati agar permainan berjalan dengan baik, dan menyenangkan.

Semua pihak baik yang menang maupun yang kalah akan merasa puas karena pertandingan berlangsung dengan obyektif (fair play). Sebaliknya jika aturan main tidak ditaati, maka akan menimbulkan keributan, bahkan bisa terjadi kekacauan. Pertandingan yang seharusnya menjadi tontonan menarik, berubah menjadi suatu kekacauan.

Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada konstitusi atau undang-undang dasar yang harus ditaati agar pemerintahan negara berjalan dengan baik, sehingga tujuan nasional dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat terwujud. Sebagai warga negara Indonesia kita perlu mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuat dan disahkan oleh para pendiri negara. Pemahaman tentang konstitusi akan mendorong seseorang untuk memiliki kesadaran berkonstitusi, kesadaran untuk mematuhi peraturan dan hukum negara.

Untuk itu kita akan mempelajari Modul bertema “Mari Membangun Kesadaran Berkonstitusi” dalam tiga unit yang saling terkait satu sama lain ini. Unit 3.1. Musyawarah dalam BPUPKI, Unit 3.2. Menjadi Bangsa yang Berkonstitusi, dan Unit 3.3. Mengingat kebaikan-kebaikan Tokoh Pendiri Negara”. Ketiga unit tersebut merupakan satu kesatuan. Pada unit pertama kita akan mempelajari pengertian konstitusi atau undang-undang dasar, Panitia Perancang UUD, serta proses perumusan UUD Negara RI Tahun 1945. Unit kedua mengajak Anda untuk mempelajari proses dan hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sistematika, dan arti penting UUD Negara RI Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan unit ketiga, mengajak kita untuk menelaah peran tokoh perumus UUD Negara RI Tahun 1945, serta mengingat dan meneladani kebaikan-kebaikan tokoh pendiri negara tersebut.

UNIT 1

MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM BPUPKI

Uraian Materi



Perhatikan gambar di atas! Adakah hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Mahkamah Konstitusi? Apakah pengertian konstitusi, samakah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Apa tugas Mahkamah Konstitusi? Bagaimana proses perumusan dan penetapan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi kita?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut silakan Anda pelajari unit 3.1 ini. Unit ini akan menguraikan tentang pengertian konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang dasar khususnya mengenai proses perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi dalam bahasa Inggris “constitution”, berarti hukum dasar. Konstitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pegangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi dibedakan menjadi dua yaitu konstitusi tertulis dan

tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut undang-undang dasar. Di negara kita konstitusi tertulis tersebut dinamakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang meskipun tidak tertulis tetapi selalu dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Contoh pidato Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus (satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI).



Gb.: Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2013



Gb.: Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2017

Apa saja yang dimuat dalam Konstitusi? Pada umumnya suatu konstitusi memuat kesepakatan dasar yang dibuat oleh suatu bangsa yang meliputi tiga hal utama yaitu kesepakatan tentang: (1) tujuan atau cita-cita bersama, (2) aturan-aturan hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, (3) bentuk negara dan prosedur ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi, adalah lembaga negara yang bertugas sebagai “penjaga konstitusi”. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji apakah suatu peraturan (undang-undang), sesuai atau tidak dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ternyata tidak sesuai, maka peraturan undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi tetap terjaga dengan baik.

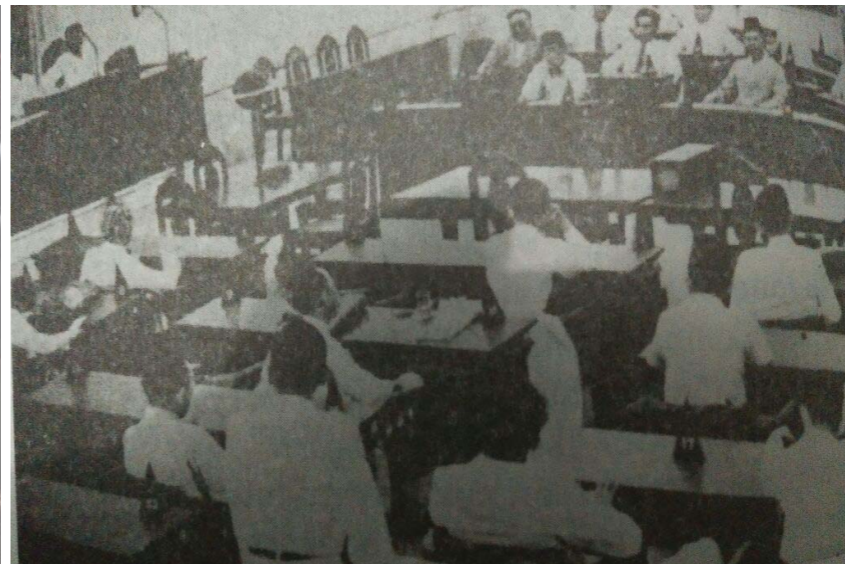
Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kita telah belajar tentang sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam modul 1. Perumusan dasar negara dilakukan oleh BPUPKI dalam sidangnya yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945.

Masih ingatkah Anda? Kapan sidang BPUPKI yang kedua dan membahas apa? Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang dasar.

Tanggal 10 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)

Acara sidang hari pertama ini adalah membahas tentang bentuk negara. Setelah dibuka oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan diperkenalkannya anggota baru, sidang dilanjutkan dengan laporan-laporan.



Gambar: Sidang BPUPKI ke 2

Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil (yang dibentuk pada masa sidang pertama), melaporkan hasil pekerjaannya yaitu:

- (1) Usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan “selekas-lekasnya Indonesia Merdeka”
- (2) Panitia Sembilan telah menghasilkan konsep Rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta.

Tanggal 11 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)

Setelah sidang mendengarkan pandangan-pandangan anggota, dibentuklah Panitia Perancang Hukum Dasar yang terdiri atas 3 (tiga) Panitia Kecil yaitu:

- (1) Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua: Ir. Soekarno)
- (2) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan (Ketua: Drs. Moh Hatta)
- (3) Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air (Ketua: Abikoesno Tjokrosoejoso).

Rapat tanggal 11 Juli 1945 yang dimulai pada Pukul 09.20 WIB, ini ditutup pada Pukul 05.15 dini hari. Selanjutnya Panitia Kecil Perancang hukum dasar bekerja sesuai tugasnya untuk dilaporkan pada sidang keesokan harinya tgl 13 Juli 1945.

Tanggal 13 Juli 1945 (Rapat Panitia Perancang UUD)

Rapat dipimpin oleh ketuanya yaitu Ir. Soekarno membahas rancangan hukum dasar yang dihasilkan Panitia Kecil. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Tanggal 14 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)

Acara sidang tanggal 14 Juli 1945 ini adalah “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sebagai ketua Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD yang menghasilkan Pernyataan Indonesia merdeka, dan Pembukaan UUD. Sedangkan batang tubuh UUD-nya dibahas keseokan hari supaya anggota punya kesempatan untuk mempelajari terlebih dahulu.

Tanggal 15 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)

Acara sidang tanggal 15 Juli 1945 adalah lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Semua anggota memberikan pendapat, usul, masukan, pertanyaan, pandangan tentang hal-hal pokok yang diatur dalam rancangan batang tubuh UUD seperti; bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara, dsb.

Tanggal 16 Juli 1945 (Rapat Besar BPUPKI)

Pembahasan lanjutan isi (batang tubuh UUD) yang kemudian diterima dengan suara bulat. Demikian pula laporan Panitia tentang Keuangan dan Perekonomian serta laporan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima secara bulat oleh sidang. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.

Hasil sidang yang diterima secara bulat tersebut tergambar jelas dalam pidato Dr. Radjiman berikut ini:

“...Jadi rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagaimanakah Tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat supaya yang setuju, yang menerima, berdiri”. Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Tuan-tuan”

Setelah sidang BPUPKI yang kedua ditutup, maka tugas BPUPKI dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Untuk melanjutkan tugas-tugas BPUPKI dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zyunbi linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, dan Wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta. Selanjutnya rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibahas dan disahkan dalam Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

PENUGASAN 1

TELAAH PERUMUSAN UNDANG-UNDANG DASAR

Setelah mempelajari Materi Unit 3.1 ini selanjutnya silakan Anda menelaah proses perumusan UUD dalam Sidang kedua BPUPKI mulai tanggal 10-16 Juli 1945, dan kemukakan pendapat Anda tentang suasana dan nilai-nilai yang tercermin dalam persidangan tersebut, serta dalam musyawarah mufakat di masa sekarang, dengan mengisi tabel LK 3.1.1 berikut.

Tujuan:

Anda akan lebih memahami proses perumusan Undang-Undang Dasar atau konstitusi Negara Republik Indonesia.

Langkah-langkah:

- Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 3.1
- Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
- Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
- Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK) 3.1.1

No	Sidang Kedua BPUPKI	Uraian Singkat Pembahasan Sidang
1	Tanggal 10 Juli 1945	
2	Tanggal 11 Juli 1945	
3	Tanggal 13 Juli 1945	
4	Tanggal 14 Juli 1945	
5	Tanggal 15 Juli 1945	
6	Tanggal 16 Juli 1945	
7.	Menurut Anda, bagaimanakah suasana sidang-sidang BPUPKI dalam merumuskan UUD Negara RI tahun 1945? Semangat dan nilai-nilai apakah yang tercermin dalam proses persidangan tersebut?	
8.	Apakah nilai-nilai semangat kebangsaan dan musyawarah mufakat juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah pada masa sekarang?	

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang perumusan UUD Negara RI Tahun 1945 silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Petunjuk.

Lengkapilah pernyataan-pernyataan berikut ini dengan jawaban yang benar.

1. Pengertian konstitusi ialah ...
2. Konstitusi dibedakan menjadi dua yaitu ... dan ...
3. Contoh dua macam Konstitusi tersebut ialah ... dan ...
4. Kesepakatan dasar yang dimuat dalam suatu konstitusi biasanya adalah ...
5. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara bertugas untuk ...
6. Rancangan Undang-Undang Dasar Negara RI dibahas dalam Sidang BPUPKI yang ke . . . tanggal . . . sampai dengan
7. Dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 dibentuklah tiga Panitia Kecil yaitu (1) (2) dan (3)
8. Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 13 Juli 1945 dibentuklah Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas (1) ...(2) ...dan (3)...
9. Rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh peserta sidang BPUKI pada tanggal . . .
10. Setelah sidang ditutup, tugas BPUPKI dianggap selesai dan dibubarkan, sebagai penggantinya dibentuklah . . .

UNIT 2

MENJADI BANGSA YANG BERKONSTITUSI

Uraian Materi

Setelah mempelajari proses persidangan BPUPKI yang kedua, yang menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar atau konstitusi di Unit 3.1, sekarang Anda akan mempelajari tentang proses pengesahannya. Kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan, dan oleh siapa? Bagaimanakah sistematika atau susunan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada saat disahkan? Apakah konstitusi itu penting bagi suatu negara? Mengapa?

Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945



Gambar: Suasana Sidang PPKI Bulan Agustus 1945 (Sumber: Risalah Sidang BUPKI dan PPKI. 1998:574)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan, dan dilandasi nilai-nilai nasionalisme yang tinggi tercermin dalam sikap kerelaan berkorban, bekerja keras, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan.

Berikut ini adalah cuplikan jalannya sidang PPKI dalam acara pengesahan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Ketua PPKI.

Ketua SOEKARNO:

Sidang yang terhormat. Pada hari ini kita berada pada suatu saat yang mengandung sejarah. Pada hari ini kita menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kemerdekaannya kemarin, menurut kehendak rakyat, telah dipermaklumkan dengan proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12 (Nippon).

Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam suatu zaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubung dengan itu saya minta kepada tuan-tuan sekalian, supaya kita pun bertindak di dalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat. Janganlah kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menurut garis-garis besar saja yang mengandung sejarah.

Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangan oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusanyangkecil-kecil hendaknya kita ke sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden."

Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 PPKI berhasil menetapkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden, dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dengan pengesahan hasil sidang PPKI tersebut, maka Indonesia menjadi suatu negara yang berkonstitusi, negara yang memiliki undang-undang dasar, namanya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diumumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-II No.7 Tahun 1946, halaman 45-48.

Perubahan Naskah Piagam Jakarta

Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan terhadap rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar maupun rancangan batang tubuh (pasal-pasal) pada naskah Piagam Jakarta hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahan-perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
- 2) Sila pertama, yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa."
- 3) Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli."
- 4) Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 memiliki susunan atau sistematika sebagai berikut.

1. Pembukaan yang berisi empat (4) alinea;
2. Batang Tubuh yaitu pasal-pasal terdiri atas:
 - a. 16 Bab
 - b. 37 Pasal
 - c. 4 Pasal Aturan Peralihan
 - d. 2 Ayat Aturan Tambahan

3. Penjelasan terdiri atas:
 - a. Penjelasan Umum
 - b. Penjelasan Pasal demi Pasal

Saat ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengalami amandemen (perubahan) sebagai upaya penyempurnaan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945”, yang merupakan pokok kaidah fundamental. Aturan dasar yang mengalami perubahan antara lain adalah tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebelum ada perubahan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Coba Anda cari informasi aturan dasar lainnya yang mengalami perubahan.

Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945

Seperti dikemukakan di depan, bahwa dalam permainan olahraga ada aturan main yang harus ditatati. Dalam keluarga yang merupakan kelompok terkecil masyarakat, juga ada aturan yang harus ditaati seluruh anggota keluarga. Demikian pula dalam masyarakat, kita sudah belajar tentang macam-macam norma.



Gambar: Sidang Paripurna MPR

Aturan-aturan itu penting agar kehidupan bersama dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Penyelenggara pemerintahan negara, dan warga negara Indonesia wajib patuh melaksanakan amanat UUD Negara RI Tahun 1945.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yaitu hukum yang tertinggi dan fundamental.

Sebagai hukum dasar, UUD Negara RI Tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting yaitu sebagai sumber bagi hukum-hukum dibawahnya. Segala hukum dan peraturan di Indonesia seperti Ketetapan MPR (termasuk ketetapan MPR untuk mengubah UUD), berbagai macam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berpedoman pada UUD Negara RI Tahun 1945, tidak boleh bertentangan. Jika ada suatu peraturan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 maka peraturan tersebut harus batal demi hukum.

PENUGASAN 2

Menganalisis Arti Penting UUD Negara RI tahun 1945

Setelah mempelajari Materi Unit 3.2 silakan Anda lanjutkan menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang mencakup; apa manfaatnya bagi warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, akibat jika tidak memiliki UUD, dampak jika warga negara tidak patuh, serta bagaimana sistematika UUD Negara RI Tahun 1945.

Tujuan:

Anda akan lebih memahami arti penting UUD Negara RI tahun 1945 bagi warga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 3.2
- b. Baca dan isi Lembar Kerja (LK) yang tersedia
- c. Cocokkan isian LK dengan kunci jawaban
- d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas
- e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.
- f. Selamat belajar dan tetap semangat!

Lembar Kerja (LK-2)
Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945

No	Aspek	Uraian
1	Manfaat UUD Negara RI Tahun 1945 bagi warga masyarakat (warga negara Indonesia)	Manfaatnya yaitu
2	Manfaat UUD Negara RI Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia	
3	Akibat bagi bangsa Indonesia jika tidak memiliki UUD.	
4	Dampak yang timbul jika warga negara tidak patuh pada UUD Negara RI Tahun 1945	
5	Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 ketika disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945	
6	Perubahan aturan dasar dalam UUD Negara RI Tahun 1945	

SOAL LATIHAN

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi Anda tentang proses pengesahan UUD Negara RI 1945, silakan Anda kerjakan soal-soal latihan berikut ini.

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum dasar oleh...
 - BPUPKI dalam Sidang I
 - BPUPKI dalam Sidang II
 - PPKI dalam Sidang hari pertama
 - PPKI dalam Sidang hari kedua
- Ketua PPKI yang memimpin Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 ialah
 - Dr. Radjiman Wedyodiningrat
 - Ir. Soekarno
 - Mr. Moh. Yamin
 - Drs. Moh. Hatta

- Perhatikan pernyataan berikut.
 - Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - Membentuk Kementerian atau Departemen
 - Memilih Presiden dan Wakil Presiden
 - Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
 - Membentuk Komite Nasional Partai Indonesia
 Dari pernyataan tersebut, hasil Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan nomor
 - (1); (2); dan (3)
 - (1); (3); dan (4)
 - (2); (3); dan (5)
 - (2); (4); dan (5)
- Salah satu perubahan naskah Piagam Jakarta yang dilakukan dalam Sidang PPKI adalah tentang
 - dihapusnya bagian Penjelasan Umum
 - dihapusnya penjelasan pasal demi pasal
 - kata Mukadimah menjadi Pembukaan
 - bertambahnya pasal-pasal Batang Tubuh UUD
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini sudah mengalami perubahan. Tujuan dari perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk
 - menyempurnakan aturan-aturan dasar
 - mengganti semua pasal dalam batang tubuh
 - menghapus penjelasan UUD RI Tahun 1945
 - menambah jumlah bab dalam UUD RI Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, bukan hukum biasa melainkan hukum yang bersifat
 - umum
 - khusus
 - tak terbatas
 - fundamental

UNIT 3

MENGINGAT KEBAIKAN-KEBAIKAN TOKOH PENDIRI NEGARA

Uraian Materi

7. Sebagai hukum dasar UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki arti yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu menjadi . . .
 - A. sumber hukum bagi hukum-hukum di bawahnya
 - B. sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
 - C. menjadi pedoman tingkah laku warga negara
 - D. pegangan dalam pergaulan hidup sehari-hari

8. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, makayang terjadi adalah
 - A. negara tersebut akan kacau dan hancur
 - B. tidak ada acuan untuk mengatur negara
 - C. rakyat akan memberontak pada negara
 - D. hak-hak warga negara tidak terlindungi

9. Sebagai hukum dasar UUD Negara RI Tahun 1945 harus dipatuhi oleh
 - A. lembaga-lembaga negara
 - B. lembaga perwakilan rakyat
 - C. penyelenggara pemerintahan
 - D. seluruh warga negara Indonesia

10. Salah satu kesepakatan dasar tentang amandemen atau perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu
 - A. tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
 - B. mempertahankan Penjelasan Umum maupun pasal-pasal
 - C. mengganti semua pasal-pasal isi UUD Negara RI Tahun 1945
 - D. mengganti susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia



Ir. Soekarno



Mr. Moh. Yamin



Drs. Moh. Hatta



Mr. A.A. Maramis



Abikusno
Cokrosujoso



Abdul Kahar
Muzakir



H. Agus Salim



K.H. Wahid
Hasyim



Mr. Achmad
Soebardjo

Gambar: Panitia Sembilan BPUPKI (Sumber: Album Perang Kemerdekaan)

Siapakah yang dimaksud dengan tokoh pendiri negara, Bapak bangsa Indonesia atau yang sering disebut The Founding Fathers? Bapak bangsa Indonesia adalah julukan bagi tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan berdirinya Negara Republik Indonesia. Para tokoh yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berdirinya sebuah negara. Seperti menyusun rancangan dasar negara Indonesia merdeka, menyusun rancangan hukum dasar bagi negara Indonesia merdeka, menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, menyusun struktur Negara Republik Indonesia dan sebagainya hingga menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara merdeka lainnya di dunia. Pembahasan mengenai kebaikan dan keteladanan tokoh pendiri negara tentu terkait dengan tokoh-tokoh dalam BPUPKI dan PPKI.

Anggota BPUPKI maupun PPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia, orang-orang terpilih dan mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, maupun golongan kebangsaan pada masa itu. Siapa saja anggota BPUPKI dan PPKI tersebut?

Susunan Keanggotaan BPUPKI

Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat Wakil Ketua : Itibangase Yosio R.P. Soeroso Anggota :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abikoesno Tjokrosejoso 2. Hadji Ah. Sanoesi 3. K.H. Abdul Halim 4. Prof. Dr.R.Asikin Widjakoesoemo 5. M. Aris 6. Abdul Kadir 7. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo 8. B.P.H. Bintoro 9. Ki Hajar Dewantoro 10. A.M.Dasaat 11. Prof. Dr. P.A.H. Djajadiningrat 12. Drs. Moh. Hatta 13. Ki Bagoes Hadikoesoemo 14. Mr. R. Hindromartono 15. Mr. Muh. Yamin 16. R.A.A. Sumitro Kolopaking P 17. Mr. Dr. R. Koesoemah Atmadja 18. Mr. J. Latuharhary 19. R.M. Margono Djojohadikoesoemo 20. Mr. A.A Maramis 21. K.H. Masjkoer 22. K.H.M. Mansoer 23. Moenandar 24. A.K. Moezakir 25. R. Oto Iskandar Dinata 26. Parada Harahap 27. B.P.H. Poeroebojo 28. R.Abdoellrahim Pratalykrama 29. R. Roeslan Wongsoekoesoemo 30. Prof. Ir. R. Rooseno 	<ol style="list-style-type: none"> 31. H. Agoes Salim 32. Dr. Samsi 33. Mr. R.M. Sartono 34. Mr.R. Samsedin 35. Mr. R. Sastromoeljono 36. Mr. R. Singgih 37. Ir.Soekarno 38. R. Soedirman 39. R. Soekardjo Wirjopranoto 40. Dr. Soekiman 41. Mr. A.Soebardjo 42. Prof.Mr.Dr. Soepomo 43. Ir.R.M.P.Soerahman Tjokroadisoerjo 44. M.Soetardjo Kartohadikoesoemo 45. R.M.T.A. Soerjo 46. Mr. Soesanto 47. Mr. Soewandi 48. Drs.K.R.M.A. Sosrodiningrat 49. K.H.A. Wachid Hasjim 50. K.R.M.T.H. Woerjaningrat 51. R.A.A.Wiranata Koesoema. 52. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro 53. Ny. Mr. Maria Ulfa Santoso 54. Ny.R.S.S.Soenarjo Mangoenpoespito 55. Oei Tjong Hauw 56. Oei Tiang Tjoei 57. Liem Koen Hian 58. Mr. Tan Eng Hoa 59. P.F. Dahler 60. A.Baswedan
Anggota Tambahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. K.H. Abdul Fatah Hasan 2. R. Asikin Nata Negara 3. BKPA Soejo Hamidjojo 4. Ir. Pangeran M.Noor 5. Mr. M. Besar 6. Abdul Kaffar. 	

Susunan Keanggotaan PPKI

Ketua : Ir. Soekarno Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta	
Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Soepomo 2. Radjiman 3. Soeroso 4. Soetardjo 5. W. Hasjim 6. Ki Bagoes Hadikoesoemo 7. Oto Iskandardinata 8. Abdoel Kadir 9. Soerjohamidjojo 10. Poeroebojo 11. Yap Tjwan Bing 12. Latuharhary 13. Dr. Amir 	<ol style="list-style-type: none"> 14. Abd. Abbas 15. Moeh. Hassan 16. Hamidhan 17. Ratulangie 18. Andipangeran 19. I Gusti Kutut Pudja Tambahan: <ol style="list-style-type: none"> 20. Wiranatakoesoema 21. Ki Hadjar Dewantara 22. Mr. Kasman 23. Sajuti 24. Koesoema Soemantri 25. Soebardjo

(Sumber: Risalah Sidang BPUPKI – PPKI Th. 1998)

Peran Para Tokoh dalam Mendirikan Negara

Berdirinya Negara Republik Indonesia ditandai dengan peristiwa bersejarah yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang serta merta terjadi. Peristiwa Proklamasi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesiamerupakan bagian dari rangkaian perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam usahanya mewujudkan cita-cita merdeka.

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesiatidak lepas dari peran para tokoh bangsa Indonesia dalam BPUPKI dan PPKI. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, ada perbedaan peran antara BPUPKI dengan PPKI. BPUPKI berperan dalam mengkaji dan menelaah, yaitu pendapat-pendapat yang diajukan dalam sidang BPUPKI di bahas dan ditanggapi oleh para anggota lainnya.

Sedangkan PPKI berperan untuk mengambil keputusan, pendapat-pendapat yang diajukan dalam sidang PPKI dirundingkan dan dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan. Ada banyak sekali tokoh BPUPKI-PPKI yang berperan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diantaranya ialah tokoh-tokoh yang berperan dalam proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar badan yang berperan adalah BPUPKI. Sedangkan dalam proses pengesahan Undang-Undang Dasar badan yang berperan adalah PPKI.

Tokoh-tokoh BPUPKI yang memegang peran dalam proses perumusan hukum dasar tersebut antara lain ialah Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI), Ir. Soekarno (anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar), Drs. Moh. Hatta (anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan), Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air). Ada pula Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Untuk lebih mengenal dan meneladani semangat serta komitmen para tokoh yang memegang peran penting dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar tersebut Anda dapat mengikuti uraian berikut ini.

Dr. K R T.Radjiman Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI yang memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan BPUPKI sehingga menghasilkan keputusan-keputusan bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan benegara di Indonesia. Beliau seorang dokter yang lahir di Yogyakarta tanggal 21 April 1879, bertugas di RS Ingatan Lawang (1904-1906), di Keraton Solo (1906-1936).

Ir. Soekarno, Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, Ketua PPKI, Proklamator, dan Presiden RI yang Pertama. Beliau lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan tokoh yang memegang peran sangat penting dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar. Sebagai Ketua Panitia Perancang Hukum Dasar, Ir. Soekarno bertanggungjawab memimpin rapat-rapat Panitia Kecil membahas segala sesuatu yang akan menjadi isi Undang-Undang Dasar. Penyiapan bahan-bahan rapat/sidang, pembahasan materi dalam sidang sering berlangsung dari pagi sampai malam, bahkan hingga dinihari. Semua dilakukan demi terwujudnya hukum dasar yang menjadi salah satu persyaratan berdirinya Negara RI.

Drs. Mohammad Hatta, tokoh pejuang, negarawan, ahli ekonomi, proklamator, dan Wakil Presiden RI yang pertama. Beliau lahir di Bukit Tinggi Sumatra Barat tanggal 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Dalam proses perumusan hukum dasar beliau menjadi Ketua Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan. Drs. Mohammad Hatta memiliki hoby membaca dan rajin menulis. Buku-buku karya beliau sangat banyak. Karena rasa kepeduliannya terhadap rakyat dan perekonomian Indonesia, beliau membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tujuan negara adalah memakmurkan rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan, maka menurut Bung Hatta bentuk usaha yang cocok untuk Indonesia adalah koperasi. (sumber: <https://www.jurnal.id> diunduh tanggal 27 Desember 2017)

Abikoesno Tjokrosoejoso, lahir di Ponorogo, 15 Juni 1897. Dalam proses perumusan hukum dasar beliau berperan sebagai Ketua Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang akan dibahas dalam sidang dan diputuskan menjadi bagian dari isi Undang-Undang Dasar.

Djajadiningrat, lengkapnya Prof. Dr. Pangeran Ario Husein Djajadiningrat, lahir tanggal 8 Desember 1886 di Kramat Watu, Kabupaten Serang. Beliau lulus dari Universitas Leiden bagian Kesusasteraan dan Filsafat. Tugas beliau dalam proses perumusan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai Tim Penghalus Bahasa bersama dengan Haji Agoes Salim, dan Mr. Soepomo. Husein Djajadiningrat dikenal sebagai salah satu pelopor tradisi keilmuan di Indonesia. Ketika masih remajabeliau dikenal sebagai pemuda yang pintar dan berbakat, baik dalam ilmu agama, maupun ilmu pengetahuan. Beliau juga dikenal sebagai ahli keislaman pada masanya, dan “Bapak metodologi penelitian sejarah Indonesia” (Sumber: <https://id.m.wikipedia.org>, diunduh tanggal 27 Desember 2017)

Haji Agoes Salim, lahir tanggal 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat. Pendidikan dasar ditempuh di Europeesche Lagere School (ELS) yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa, kemudian melanjutkan ke Hoogere Burgerschool (HBS) di Batavia, dan saat lulus beliau menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Kemudian Haji Agoes salim bekerja sebagai penerjemah. Dalam proses perumusan hukum dasar, Haji Agoes Salim menjadi Tim Penghalus Bahasa. (Sumber: <https://id.m.wikipedia.org>, diunduh tanggal 27 Desember 2017)

Prof. Mr. Dr. Soepomo, lahir tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Solo, wafat di Jakarta 22 Januari 1958. Beliau seorang ahli hukum yang karena pemikiran-pemikirannya tentang hukum dasar dikenal sebagai “arsitek” Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 bersama tokoh yang lain seperti Muhamad Yamin. Dalam Sidang BPUPKI Tanggal 31 Mei 1945 Mr. Soepomo mengusulkan rancangan dasar negara, bersama Ir. Soekarno, dan Mr. Muhamad Yamin. Dalam proses perumusan hukum dasar selain aktif menyampaikan pikiran-pikirannya, beliau juga dipercaya sebagai Tim Penghalus Bahasa untuk Rancangan Undang-Undang Dasar.

Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas hanyalah sebagian dari para tokoh pendiri negara. Selain tokoh-tokoh tersebut masih banyak lagi tokoh yang berperan dan berjasa dalam mendirikan negara. Siapa mereka, bisakah Anda menyebutkannya? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongan. Agar seluruh unsur bangsa Indonesia dapat hidup dan bekerjasama dalam satu negara yang sama, diperlukan adanya kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan kehidupan kenegaraan akan diatur berdasarkan kekuasaan belaka.

Para pendiri negara bersepakat bahwa negara yang didirikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu suatu negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat persatuan dan kesatuan, kebangsaan atau nasionalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan didasari oleh tekad untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakatnya majemuk.

Sungguh luar biasa pemikiran, peran dan jasa para pendiri negara Indonesia. Kita patut bangga dan meneladani semangat kebangsaan maupun komitmen pada para pendiri negara, dalam merwujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh para pendiri negara tersebut. Kita harus menjunjung tinggi kesepakatan nasional para pendiri negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Apa saja kesepakatan nasional para pendiri negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945? Diantaranya ialah tentang susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945 merupakan Pokok Kaidah Fundamental berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu tidak dapat diubah.

PENUGASAN 3

Keteladanan Tokoh Pendiri Negara

Setelah mempelajari Materi Unit 3.3 tentang Keباikan-keباikan para tokoh pendiri negara, Anda dapat melanjutkan kegiatan dengan membuat tulisan singkat tentang sikap, perilaku, dan peran dari para tokoh pendiri negara yang patut diteladani oleh para generasi penerus bangsa Indonesia.

Tujuan:

Tujuan penugasan ini adalah:

- Agar Anda lebih mengenal tokoh pendiri negara, dan mengikuti teladan yang diberikan.
- Meningkatkan keterampilan Anda dalam menulis

Langkah-langkah:

- a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 3.3
- b. Siapkan kertas untuk menulis laporan
- c. Pilih salah satu tokoh pendiri negara yang menarik perhatian Anda
- d. Anda dapat menggali informasi sebanyak mungkin tentang tokoh yang Anda pilih dari berbagai sumber
- e. Tuliskan biografi, peran, sikap, perilaku, komitmen kebangsaan, dan sebagainya yang melekat pada diri tokoh pilihan Anda tersebut.
- f. Laporkan kepada Tutor untuk mendapat penilaian
- g. Selamat menulis dan tetap semangat!



MARI KITA INGAT KEMBALI

1. Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk 3 (tiga) Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang-Undang Dasar.
2. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 : (1) Mengesahkan UUD 1945; (2) Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden; (3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
3. Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 ketika disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.
 - 1) Pembukaan yang berisi empat (4) alinea;
 - 2) Batang Tubuh yaitu pasal-pasal terdiri atas:
 - a. 16 Bab
 - b. 37 Pasal
 - c. 4 Pasal Aturan Peralihan
 - d. 2 Ayat Aturan Tambahan
 - 3) Penjelasan terdiri atas:
 - a. Penjelasan Umum
 - b. Penjelasan Pasal demi Pasal
4. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat.

Kunci Jawaban

Penugasan.1

Telaah Perumusan Undang-Undang Dasar

No	Sidang Kedua BPUPKI	Uraian Jawaban dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Tanggal 10 Juli 1945	<p>1) Membahas tentang bentuk negara</p> <p>2) Laporan hasil kerja Panitia Kecil oleh Ir. Soekarno yaitu:</p> <p>3) Bahwa usulan-usulan yang masuk mengarah pada permintaan "selekas-lekasnya Indonesia Merdeka"</p> <p>4) Panitia Sembilan telah menghasilkan konsep Rancangan Pembukaan UUD yaitu Piagam Jakarta.</p> <p>Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 4 unsur yang benar Skor 7,5 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 5 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 2,5 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar</p>	0 - 10
2	Tanggal 11 Juli 1945	<p>Pembentukan Panitia Perancang hukum dasar yaitu:</p> <p>1) Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua: Ir. Soekarno)</p> <p>2) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan (Ketua: Drs. Moh Hatta)</p> <p>3) Panitia Perancang Pembelaan Tanah air (Ketua: Abikusno Tjokrosoejoso).</p> <p>Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 5 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 3 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar</p>	0 - 10

No	Sidang Kedua BPUPKI	Uraian Jawaban dan Kriteria Penilaian	Skor
3	Tanggal 13 Juli 1945	<p>Membahas beberapa hal dan menyepakati ketentuan tentang: 1) Lambang Negara, 2) Negara Kesatuan, 3) sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan 4) membentuk Panitia Penghalus Bahasa</p> <p>Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 4 unsur yang benar Skor 7,5 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 5 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 2,5 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar</p>	0 - 10
4	Tanggal 14 Juli 1945	<ul style="list-style-type: none"> Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan Panitia Perancang UUD yang menghasilkan: 1) Pernyataan Indonesia merdeka, dan 2) Pembukaan UUD. <p>Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 5 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 3 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar</p>	0 - 10
5	Tanggal 15 Juli 1945	<p>Pembahasan rancangan Batang Tubuh UUD antara lain: bentuk negara, presiden, lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, warga negara, hak asasi manusia, lambang negara, dsb.</p> <p>Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 5 atau lebih unsur benar Skor 8 Jika jawaban memuat 4 unsur benar Skor 6 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 4 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 2 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur benar</p>	0 - 10

No	Sidang Kedua BPUPKI	Uraian Jawaban dan Kriteria Penilaian	Skor
6	Tanggal 16 Juli 1945	Pembahasan lanjutan tentang Batang Tubuh UUD serta diterimanya rancangan UUD secara bulat oleh sidang. Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban benar Skor 5 Jika ada unsur jawaban benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur benar	0 - 10
7a. Suasana sidang BPUPKI dapat digambarkan sangat demokratis. Secara bergantian peserta sidang memberikan pandangannya, usul-usul, masukan, pemikiran-pemikirannya, kemudian berdiskusi, dan beradu argumen yang semuanya ditujukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu persiapan kemerdekaan.		Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban benar Skor 5 Jika ada unsur jawaban benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur benar	0 - 10
7b. Semangat yang tercermin adalah semangat kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerelaan berkorban, nasionalisme, patriotisme, tanggungjawab, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.			
8. Pada masa sekarang nilai-nilai dan semangat kebangsaan, musyawarah untuk mufakat masih melekat kuat pada masyarakat bangsa Indonesia khususnya di daerah. Sedangkan di lingkungan masyarakat perkotaan, nilai-nilai tersebut cenderung mulai memudar.		Kriteria Penilaian Skor 20 Jika jawaban memuat dua unsur benar Skor 10 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar	0-20
Jumlah Skor			100

Nilai Akhir = Jumlah skor yang diperoleh

Penugasan 2

Kunci Jawaban Soal Latihan

No	Kunci Jawaban	Skor
1	Konstitusi ialah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban sangat sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau sangat tidak sesuai	0 - 10
2	Konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) dan konstitusi tidak tertulis (disebut Konvensi) Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban sangat sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau sangat tidak sesuai	0 - 10
3	Contoh konstitusi tertulis: UUD Negara RI Tahun 1945 Contoh Konvensi yaitu: Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban sangat sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau sangat tidak sesuai	0 - 10
4	Kesepakatan dasar dalam konstitusi yaitu: (1) tujuan atau cita-cita bersama, (2) aturan-aturan hukum sebagai ladaan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, (3) bentuk negara dan prosedur ketatanegaraan. Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 5 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 3 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar	0 - 15
5	Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjadi "Penjaga Konstitusi". Tugasnya menguji apakah suatu peraturan (undang-undang), sesuai atau tidak dengan konstitusi (hukum yang tertinggi). Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban sangat sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau sangat tidak sesuai	0 - 10

6	Sidang BPUPKI yang kedua Tanggal 10-16 Juli 1945 Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban sangat sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak sesuai	0 - 10
7	a. Panitia Perancang Hukum Dasar (Ketua: Ir. Soekarno) b. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan (Ketua: Drs. Moh Hatta) c. Panitia Perancang Pembelaan Tanah air (Ketua: Abikoesno Tjokrosoejoso). Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 5 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 3 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar	0 - 15
8	Panitia Penghalus Bahasa terdiri atas: Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban memuat 3 unsur benar Skor 5 Jika jawaban memuat 2 unsur benar Skor 3 Jika jawaban memuat 1 unsur benar Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang benar	0 - 10
9	Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban sangat sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau sangat tidak sesuai	0 - 5
10	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan ketuanya Ir. Soekarno dan Wakilnya Drs. Moh. Hatta. Kriteria Penilaian Skor 10 Jika jawaban sangat sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau sangat tidak sesuai	0 - 5
Jumlah Skor		100

Nilai Akhir = Jumlah skor yang diperoleh

Penugasan 3

LK 3.2.1 Analisis Arti Penting UUD Negara RI Tahun 1945

No	Kunci Jawaban	Skor
1	Manfaat UUD Negara RI Tahun 1945 bagi warga negara Indonesia ialah selain sebagai pedoman hukum yang tertinggi, UUD Negara RI Tahun 1945 juga sebagai jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Kriteria Penilaian Skor 15 Jika jawaban sangat sesuai Skor 10 Jika jawaban sebagian besar sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian kecil sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada yang sesuai	0 - 15
2	Manfaat UUD Negara RI Tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai pegangan dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai hukum dasar yaitu sebagai sumber bagi hukum-hukum dibawahnya Kriteria Penilaian Skor 15 Jika jawaban sangat sesuai Skor 10 Jika jawaban sebagian besar sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian kecil sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada yang sesuai	0 - 15
3	Jika tidak memiliki UUD, maka suatu negara akan mengalami kesulitan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara karena tidak ada pedomannya. Kriteria Penilaian Skor 15 Jika jawaban sangat sesuai Skor 10 Jika jawaban sebagian besar sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian kecil sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada yang sesuai	0 - 15
4	Jika warga negara tidak patuh pada UUD Negara RI Tahun 1945, maka tidak akan terwujud ketertiban dalam masyarakat, dan akan terkena sanksi hukum. Kriteria Penilaian Skor 15 Jika jawaban sangat sesuai Skor 10 Jika jawaban sebagian besar sesuai Skor 5 Jika jawaban sebagian kecil sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada yang sesuai	0 - 15

No	Kunci Jawaban	Skor
5	<p>Sistematika UUD Negara RI Tahun 1945 ketika disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.</p> <p>1) Pembukaan yang berisi empat (4) alinea;</p> <p>2) Batang Tubuh yaitu pasal-pasal terdiri atas:</p> <p>a. 16 Bab</p> <p>b. 37 Pasal</p> <p>c. 4 Pasal Aturan Peralihan</p> <p>d. 2 Ayat Aturan Tambahan</p> <p>3) Penjelasan terdiri atas:</p> <p>a. Penjelasan Umum</p> <p>b. Penjelasan Pasal demi Pasal</p> <p>Kriteria Penilaian Skor 30 Jika jawaban sangat sesuai Skor 20 Jika jawaban sebagian besar sesuai Skor 10 Jika jawaban sebagian kecil sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada yang sesuai</p>	0 - 30
6	<p>Aturan dalam UUD Negara RI yang mengalami perubahan ialah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat melalui pemilu - Masa jabatan presiden maksimal dua periode <p>Skor 10 Jika jawaban memuat 2 unsur sesuai Skor 5 Jika jawaban memuat 1 unsur sesuai Skor 0 Jika tidak menjawab atau tidak ada unsur yang sesuai</p>	0 - 10
Jumlah Skor		100

Penugasan 3.2.2

Soal Latihan

Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

- | | |
|------|-------|
| 1. C | 6. D |
| 2. B | 7. A |
| 3. B | 8. B |
| 4. C | 9. D |
| 5. A | 10. A |

Kriteria Penilaian: Setiap soal yang dijawab benar diberi skor 1, skor maksimal adalah 10.

Jumlah Skor yang diperoleh
$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Skor Maksimum}} \times 100$

Penugasan 3.3.1

Rubrik Penilaian "Keteladanan Tokoh Pendiri Negara"

No	Aspek yang Dinilai	Skor
1	Kesesuaian isi tulisan dengan tema yang ditugaskan - Sangat sesuai, Skor: 30 - Sesuai, Skor: 20 - Kurang sesuai, Skor: 10	0 - 30
2	Kelengkapan informasi tentang tokoh yang dipilih - Sangat Lengkap, Skor: 40 - Lengkap, Skor: 30 - Cukup Lengkap, Skor: 20 - Kurang Lengkap, Skor: 10	0 - 40
3	Ketepatan waktu pengumpulan tugas sesuai kesepakatan - Tepat waktu sesuai kesepakatan (atau lebih awal), Skor: 30 - Sedikit terlambat dari batas waktu yang disepakati, Skor: 20 - Sangat terlambat dari batas waktu yang disepakati, Skor: 10	0 - 30
Jumlah Skor		100

Saran Referensi

Lukman Surya S, Aa Nurdiaman, dan Salikun. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen

Daftar Pustaka

Darmodiharjo, Darji.1988. Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional. Surabaya: Usaha Nasional.

Lukman Surya S, Aa Nurdiaman, dan Salikun. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lukman Surya S, Aa Nurdiaman, dan Salikun. 2016. Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2007. Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk SMP/MTs. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Negara RI. 1998. Risalah Sidang BPUPKI PPKi 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Reublik Indonesia.

Sugito, AT. 2002. Pendidikan Pancasila. Semarang: UPT MKU UNNES.

<http://cdn1-a.production.images.static6.com>. Diunduh tanggal 16 Nov 2017

<https://i0.wp.com/suarajakarta>. Diunduh tanggal 16 November 2017

<http://cdn-media.viva.id>. Diunduh tanggal 16 November 2017

<http://cdn2.tstatic.net/tribunnews>. Diunduh tanggal 16 November 2017

<https://www.google.co.id/search?q>. Diunduh tanggal 17 November 2017

<https://upload.wikimedia.org>) diunduh tanggal 11 Desember 2017

<https://www.jurnal.id> diunduh tanggal 27 Desember 2017)

<https://id.m.wikipedia.org>, diunduh tanggal 27 Desember 2017)